MUARA: Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional
Vol 3, No 2, Oktober 2020
ISSN: 2715-6583; http://jurnal.apn-surakarta.ac.id/index.php/muara

DISBURSEMENT JASA KEAGENAN KAPAL DI PT DIAN SAMUDERA LINE CABANG SURABAYA

Shinta Mardiana Dewi, Sulistiani Sholeh Khatun
Akademi Pelayaran Nasional Surakarta

ABSTRAK

Perusahaan melakukan sistem penjualannya berupa jasa secara kredit maka kemudian akan timbul piutang. Piutang usaha perusahaan keagenan diperoleh dari *disbursement* (pembayaran) jasa keagenan kapal. Oleh sebab itu agen kapal harus memepertanggungjawabkan segala pengeluaran atas kapal milik *principal* yang terjadi selama berada di pelabuhan dalam bentuk *disbursement* untuk ditagihkan kepada *principal*. Pengendalian piutang merupakan suatu perangkat alat yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena piutang yang tidak dapat ditagih merupakan faktor yang akan merugikan perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan *disbursement* di PT Dian Samudera Line cabang Surabaya. Hal ini ditinjau dari proses pemberian piutang terhadap *principal* dan proses penagihan *disbursement* jasa keagenan kapal yang diageninya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulisan dilakukan di PT Dian Samudera Line Cabang Surabaya

Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan *disbursement* jasa keagenan kapal di PT Dian Samudera Line cabang Surabaya melalui beberapa tahapan. Tahapan yang dimaksud diantaranya: 1. Pemberian piutang usaha ke *principal* dengan cara melakukan penawaran jasa. Penawaran jasa yang dimaksud yaitu dengan mengirimkan EPDA (*Estimated Port Disbursement Account)* kepada *principal*. Setelah harga tersebut disepakati *principal* membayarkan *advance* sebelum kapal datang, 2. Melakukan pembayaran atas pengeluaran kapal selama di pelabuhan. 3. Melakukan penagihan *disbursement* jasa keagenan kapal ke *principal*. Proses penagihan *disbursement* dengan cara mengumpulkan bukti-bukti pembayaran pengeluaran kapal pembuatan *invoice* dan *final invoice*, kemudian bukti pembayaran dan *invoice* tersebut dikirimkan melalui *email* dan jasa kurir untuk ditagihkan ke *principal*. Adapun kendala yang menyebabkan penagihan *disbursement* dan kegiatan operasional menjadi terhambat. Kendala tersebut diantaranya kurangnya SDM, keteledoran bagian operasional dalam menyimpan bukti pembayaran, tidak diberikannya diskon dan sanksi dalam pelunasan *disbursement* serta pelunasan *disbursement* yang melebiihi tanggal jatuh tempo.

Kata Kunci: *disbursement*, penagihan, piutang usaha

PENDAHULUAN

Keagenan kapal sebagai pihak yang bertugas mewakili pemilik kapal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kapal. Hal ini dilakukan agar kegiatan kapal selama di pelabuhan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Agen juga harus mempersiapkan fasilitas sebelum kapal tiba dan memastikan kegiatan bongkar maupun muat dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap kepentingan kapal selama di pelabuhan. Menurut Suryono, (211-213), agen kapal adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan atau aktifitas kapal atau perusahaan pelayaran. Sementara itu, Salim, (1993, 98) mengatakan bahwa agen pelayaran adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam kegiatan atau aktifitas kapal atau perusahaan pelayaran.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian dimana salah satu pihak yang dinamakan pemilik *(principal)* dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang direncanakan kepadanya**.**

Teori *agency* menjelaskan hubungan antara *agent* dan *principal*. Menurut Rebecca (2012) membuktikan bahwa teori *agency* adalah

suatu hubungan yang timbul akibat adanya kontrak kepada pihak pemilik modal *(principal)* yang mendelegasikan pekerjaan dan agen *(agent)* sebagai pihak yang menerima pendelegasian pekerjaan, yang berarti terjadi antara kepemilikan dan kontrol perusahaan.
Pada *agency theory* yang disebut principal merupakan pihak yang memberikan perintah, mengawasi, memberikan penilaian dan masukan atas tugas yang akan dilakukan oleh *agent*. Sedangkan yang dimaksud dengan agent adalah pihak yang menerima dan menjalankan tugas sesuai kehendak *principal*. Ketika *principal* dan *agent* berkeinginan untuk dapat memaksimalkan kepentingan masing-masing, maka ada kemungkinan *agent* bertindak tidak untuk kepentingan *principal*. *Principal* berusaha untuk memaksimalkan laba *(risk takers)*, sedangkan agent sebagai pelaksana aktivitas cenderung tidak menyukai resiko yang sangat besar *(risk adverse)*. Untuk mengurangi konflik tersebut, maka principal perlu monitoring kinerja agent.

Dasar dari kinerja agen kapal berada pada ETA *(Estimated Time Arrived)* atau perkiraan kedatangan kapal dan ETD *(Estimated Time Departure)* atau perkiraan waktu keberangkatan kapal. Setelah kapal berangkat, maka agen kapal harus memepertanggungjawabkan segala pengeluaran atas kapal milik *principal* yang terjadi selama berada di pelabuhan dalam bentuk *disbursement*.

PT Dian Samudera Line cabang Surabaya merupakan perusahaan keagenan yang menjual jasanya untuk melayani kapal dan mengurus segala yang dibutuhkan oleh kapal. Pada saat perusahaan melakukan sistem penjualannya berupa jasa secara kredit maka kemudian akan timbul piutang. Hal ini akan berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan terutama berdampak pada arus kas. Piutang merupakan salah satu bagian penting dalam harta lancar perusahaan. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa pengendalian piutang merupakan suatu perangkat alat yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena piutang yang tidak dapat ditagih merupakan faktor yang akan merugikan perusahaan.

Penghasilan yang didapat dari usaha keagenan atas jasa yang diberikan kepada kapal-kapal yang telah menunjuknya untuk melayani kegiatan kapal di pelabuhan. Dalam menjalankan aktivitasnya PT Dian Samudera Line cabang Surabaya melakukan kegiatan penjualan jasa keagenan. Penagihan disbursement (pembayaran) jasa keagenan tersebut dilakukan dikemudian hari setelah kapal meninggalkan pelabuhan dan nota tagihan lengkap. Apabila kapal akan berlabuh di salah satu pelabuhan dan menunjuk PT Dian Samudera Line cabang Surabaya sebagai agent, maka pemilik kapal akan membuat surat penunjukan keagenan (letter of appointment). Berdasarkan surat penunjukan keagenan tersebut perusahaan melalui bagian keuangan akan membuat penagihan atau invoice sementara untuk pembayaran yang digunakan dalam mengurus segala sesuatau yang berkaitan dengan penyandaran kapal di pelabuhan. Setelah pelayanan jasa atau pelaksanaan kegiatan perkapalan telah selesai, bagian keuangan membuat kembali invoice secara lengkap dengan rincian biaya disbursement sesuai dengan dokumen kegiatan perkapalan dan melampirkan bukti dokumen kegiatan perkapalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut mengenai penagihan *disbursement* terhadap *general agent* atau *principal* yang terhambat beberapa permasalahan yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan, maka menjadi penting kemuadian untuk dilakukan penelitian mengenai Pengelolaan *Disbursement* Jasa Keagenan Kapal dalam hal ini yang dilakukan oleh PT Dian Samudera".

KAJIAN TEORI

*Disbursemen*t merupakan salah satu kata dalam bahasa inggris yang dapat diartikan kedalam bahasa Indonesia yaitu pembayaran. Jadi disbursement padanan katanya yaitu pembayaran. Menurut Chan Kah Sing (2009:108), pembayaran (disbursement) adalah proses penukaran mata uang dengan barang, jasa atau informasi. Sedangkan menurut Hasibuan (2010:117), pembayaran (*disbursement*) yaitu berpindahnya kepemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan. Dapat disimpulkan kemudian bahwa pembayaran (disbursement) adalah proses pemenuhan kewajiban atas pemberian barang, jasa atau informasi yang timbul dari kegiatan ekonomi baik langsung maupun melalui media jasa perbankan.

Disbursement terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: secara tunai dan secara kredit. Dalam hal ini, perusahaan keagenan memberikan jasanya dengan cara kredit. Kredit ditimbulkan karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa yang disebut piutang usaha. Menurut Pulungan dkk (2012:145), piutang usaha merupakan piutang yang berasal dari penjualan secara kredit. Jatuh tempo piutang usaha biasanya berkisar antara 30 hari sampai dengan 60 hari. Senada dengn Setiawan (2010:199), piutang usaha adalah segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain yang pelunasanya dapat dilakukan dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Dapat disimpulkan bahwa piutang usaha adalah segala bentuk tagihan atau klaim yang berasal dari penjualan secara kredit baik barang, uang maupun jasa.

Beberapa teknik pengumpulan piutang atau penagihan akan berbeda di setiap perusahaan, antara lain: melalui surat, telepon ataupun kunjungan personal. JAlan terkahir adalah dengan mengambil tindakan yuridis, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam hal pembayaran piutang.

Penagihan melalui melalui surat, bilamana waktu pembayaran utang dari pelanggan sudah lewat beberapa hari, tetapi belum juga dilakukan pembayaran maka perusahaan akan mengirim surat yang berisi untuk mengingatkan pelanggan. Apabila utang tersebut belum juga dibayar makan akan mengirimkan surat kedua yang berisi peringatan yang lebih keras untuk membayar utangnya.

Apabila setelah dikirim surat teguran ternyata utang belum juga dibayar, maka bagian penagihan akan menelepon ke pelanggan. Apabila pelanggan dapat memberikan alasan yang dapat di terima maka perusahaan akan memberikan perpanjangan waktu

Selain itu, penagihan piutang dapat dilakukan dengan cara melakukan kunjungan langsung kepada pelanggan yang bersangkutan dan biasanya teknik ini sangat efektif dalam pengumpulan piutang.

Bila ternyata pelanggan tetap tidak mau membayar utang, maka perusahaan akan melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud untuk mendiskripsikan fakta, objek atau persoalan secara rinci dan mendalam mengenai penagihan disbursement jasa keagenan PT Dian Samudera Line cabang Surabaya terhadap *principal*.

Perusahaan ini merupakan perusahaan keagenan kapal bukan perusahaan pelayaran. Hal ini karena ijin usaha PT Dian Samudera Line bukan SIUPAL (Surat Ijin Pelayaran Angkutan Laut) melainkan SIUPKK (Surat Ijin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal). PT Dian Samudera Line bergerak dibidang *shipping agency* yang meliputi wilayah Indonesia dan luar negeri yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran lain dan menjadi keagenan kapal-kapal lain atau asing. PT Dian Samudera Line menjalankan kegiatan usaha sebagai pengangkutan laut antar pulau, perwakilan atau *owner representative* dari perusahaan pelayaran dan bertanggung jawab penuh atas kapal yang diageni.

Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemandu, pembimbing prada, kepala-kepala bagian, karyawan atau pegawai PT Dian Samudera Line cabang Surabaya. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui tangan orang lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen pembayaran disbursement jasa keagenan, informasi yang didapat dari google, buku-buku dan jurnal penelitian dan dokumen-dokumen kapal yang ada di perusahaan.

Peneliti melakukan proses analisa dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Teknik triangulasi data digunakan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. dengan membandingkan hasil wawancara antara *key informan*, dan membandingkan observasi dengan wawancara

dan dokumen atau laporan terkait pengelolaan *disbursme*nt oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dengan interaksi dengan memperhatikan 3 (tiga) macam komponen pokok, meliputi : Reduksi data, yang diawali dengan pembatasan masalah penelitian pada pelaksanaan manajemen khususnya pada aspek fungsi pengawasan keiatan bongkar muat kontainer. Langkah selanjutnya, data yang berupa hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen direduksi dan dipilih mana yang menonjol.

Sajian data kemudian disusun logis dan sistematis, disajikan dalam kalimat deskriptif yang disertai tabel pendukung. Pada akhir laporan, peneliti menarik kesimpulan dari sajian data yang tersusun. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan tujuan hasil akhir penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

HASIL PENELITIAN

Segala kegiatan atau aktivitas tentunya akan melalui suatu proses. Begitupula dengan proses penagihan *disbursement* jasa keagenan kapal terhadap *principal* di PT Dian Samudera Line cabang Surabaya Pada dasarnya pengguna jasa atau principal akan menunjuk Perusahaan keagenan untuk mengageni kapalnya. Aktifitas dimulai dari principal melakukan permintaan penawaran harga (EPDA) dari perusahaan keagenan sehingga muncul perjanjian atau kerjasama yang telah disepakati, kemudian timbul piutang perusahaan, hingga pada tahap akhir adalah proses penagihannya. Selanjutnya principal melakukan pembayaran terhadap perusahaan keagenan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai harus adanya kesepakatan atara perusahaan dengan customer untuk memberikan kredit. Perusahaan harus memberikan persyaratan untuk melakukan kesepakatan dengan customer untuk melakukan penawaran harga dan jangka waktu penagihan. (Surupati, 2013) Sejalan pula dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai ketentuan-ketentuan perusahaan untuk memberikan penawaran kredit terhadap customer. Pemberian penawaran harga (EPDA) kepada customer sebagai dasar untuk melakukan kesepakatan atau kerjasama. (Surono, Rahayu dan Zahroh, 2015)

Demikian pula halnya dengan PT. Dian Samudera Line, perusahaan ini memberikan penawaran harga atau *Estimated Price Disbursement Agent* (EPDA) kepada *principal*. EPDA biasanya berisi tentang rincian perkiraan biaya-biaya yang dikeluarkan selama kapal berada di pelabuhan. Dalam EPDA tertulis pula *agency fee* yang diminta oleh PT Dian Samudera Line cabang Surabaya. Semua biaya-biaya yang tercantum dalam EPDA belum tentu sama dengan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan.

Setelah terjadi kesepakatan harga, PT Dian Samudera Line cabang Surabaya memberitahukan syarat-syarat dan ketentuan dalam memberikan kredit kepada PT. Mitsi Citra Mandiri selaku *principal*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: Sebelum kapal datang *principal* harus memberikan advance atau uang muka minimal 50% dari total biaya pengeluaran kapal SPOB. sebagai acuannya yaitu EPDA. Pembayaran *advance* atau uang muka dilakukan sebelum kapal sandar di pelabuhan. Jangka waktu pembayarn *disbursement* jasa keagenan kapal maksimal 1 bulan terhitung sejak tanggal penagihan oleh bagian *finance and accounting*. Kemudian, principal mengirimkan surat penunjukan agen atau *letter of appointment* ke PT Dian Samudera Line. *Letter of appointment* dikirimkan melalui email terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendaftarkan kapal di *inaportnet*. Selanjutnya mengirimkan *letter of appointment* yang asli melalui jasa kurir.

Selanjutnya, sebelum kapal datang ke pelabuhan bagian operasional membuat rincian perkiraan biaya pengeluaran selama kapal berada di pelabuhan. Bagian operasional meminta cashbond ke bagian *finance and accounting* sesuai dengan jumlah rincian biaya yang telah dibuat. Bagian operasional sebelum kapal tiba dipelabuhan mendaftarkan kapal yang diageni sebagai persyaratan permintaan layanan kedatangan dan keberangkatan pada sistem *Inaportnet*. Hal ini dilakukan agar kapal tidak menunggu antrian sandar pada saat tiba dipelabuhan.

Sebelum kapal tiba di pelabuhan PT. Dian Samudera Line cabang Surabaya melakukan pembayaran untuk mendapatkan pelayanan jasa

kepelabuhanan ke Pelindo III Surabaya melalui aplikasi anjungan pelindo. Pembayaran tersebut berupa biaya-biaya yang akan dikeluarkan kapal selama di pelabuhan. Aplikasi anjungan pelindo juga berisi mengenai total pembayaran atas kapal yang diageni. Jika pembayaran kurang perusahaan akan ditagih oleh pihak pelindo melalui nota-nota tagihan. Sebaliknya jika pembayaran melebihi yang seharusnya maka sisa uang akan dimasukan ke utip (saldo anjungan perusahaan).

Setelah kapal sandar di pelabuhan maka selanjutnya bagian operasional melakukan pembayaran atas kebutuhan kapal. Setiap kapal memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tentunya hal ini berkaitan dengan biaya, biaya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: biaya fix (biaya pokok) dan biaya kenavigasian.

Biaya *fix* atau biaya pokok adalah biaya yang sudah pasti ada dalam mengageni kapal. Biaya ini merupakan biaya-biaya utama yang harus dikeluarkan selama dikapal. Biaya-biaya tersebut diantaranya, yaitu: biaya pelabuhan *(port charge)* yang terdiri dari *a) harbour dues* yang merupakan biaya yang dihitung mulai dari kapal datang dan labuh di pelabuhan. *Harbour dues* dihitung berdasarkan total waktu kapal akan berlabuh di pelabuhan, dan diukur berdasarkan ETMAL (1 ETMAL=24 jam). Artinya, antrian suatu kapal di pelabuhan untuk menunggu giliran sandar tentunya memerlukan ketersediaan tempat. *B) berth dues* yang Merupakan biaya yang dikeluarkan mulai kapal sandar hingga lepas tali dari dermaga. Biaya tambat adalah besarnya biaya ini tergantung pada GRT per etmal. Perhitungan etmal adalah waktu kapal kurang dari 6 jam dihitung sebagai ¼ etmal, waktu tambat 6-12 jam di hitung ½ etmal. C) *Tuggae Dues* yaitu biaya kapal tunda yang akan membantu kapal sandar dan lepas tali dari dermaga.

Sementara itu, biaya kenavigasian adalah biaya pelayanan yang diberikan atau disediakan yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, *hidrooceanografi*, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, *salvage* dan pekerjaan bawah air, untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

Setiap mengageni kapal bagian operasional sebelum kapal datang membuat laporan biaya operasional kapal yang nantinya diberikan kepada bagain *finance and accounting*. Saat kapal berada di pelabuhan bagian operasional melakukan pembayaran kebutuhan kapal. Setelah kapal selesai melakukan aktivitas di Pelabuhan, kemudian bagian operasional dan bagian *finance and accounting* melakukan tugasnya masing-masing, diantaranya: (a) Bagian Operasional Setelah kapal meninggalkan Pelabuhan Gresik, bagian operasional membuat laporan penyelesaian. Laporan penyelesaian yang dimaksud adalah laporan rincian keuangan selama kapal berada di *pelabuhan*. Laporan penyelesian ini akan diserahkan ke bagian *finance and accounting* yang digunakan sebagai dasar penyusunan invoice untuk penagihan disbursement ke pihak *principal*. (b) Bagian *finance and accounting*

Setelah kapal meninggalkan pelabuhan, bagian *finance and accounting* mengumpulkan kwitansi-kwitansi pembayaran dari bagian operasional untuk merekap laporan keuangan kapal. Kemudian bagian *finance and accounting* membuat invoice penagihan ke pihak *principal*. Invoice dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *Invoice* dan *final invoice.*

Invoice, merupakan *invoice* yang dibuat oleh bagian *finance and accounting* yang kemudian di serahkan kepada kepala cabang. *Invoice* tersebut nantinya akan dikoreksi oleh kepala cabang. Sedangkan *Final Invoice* adalah *invoice* yang sudah *fix* atau tetap yang berisi rincian biaya-biaya *disbursement* ringkasan dari *invoice*.

Setelah bagian *finance and accounting* mengumpulkan kwitansi atau bukti pembayaran dan membuat *invoice* kemudian PT Dian Samudera Line melakukan penagihan terhadap *principal*. Sistem yang digunakan perusahaan yaitu dalam waktu 3 (tiga) hari setelah kapal berangkat (meninggalkan pelabuhan) bagian *finance and accounting* menyiapkan bukti-bukti penagihan *disbursement,* diantaranya bukti pembayaran dan *final invoice*. Setelah bukti-bukti lengkap, dalam 5 (lima) hari bagian *finance and accounting* akan melakukan penagihan *disbursement* terhadap *principal*.

Penagihan *disbursement* merupakan prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan piutang-piutang bilamana sudah jatuh tempo dan keefektifan kebijaksanaan tersebut tergantung kepada jumlah piutang tak tertagih yang ada. Dalam penjualan kredit selalu

tertera kapan piutang tersebut jatuh tempo dan apakah ada diskon yang diberikan. Perusahaan memberikan jangka waktu 1 bulan terhadap *principal* dalam melakukan pembayaran. Apabila melebihi jangka waktu yang diberikan perusahaan maka akan dilakukan penagihan kembali.

Alur dalam proses penagihan disbursement jasa keagenan kapal terhadap principal di PT Dian Samudera Line cabang Surabaya adalah sebagai berikut:

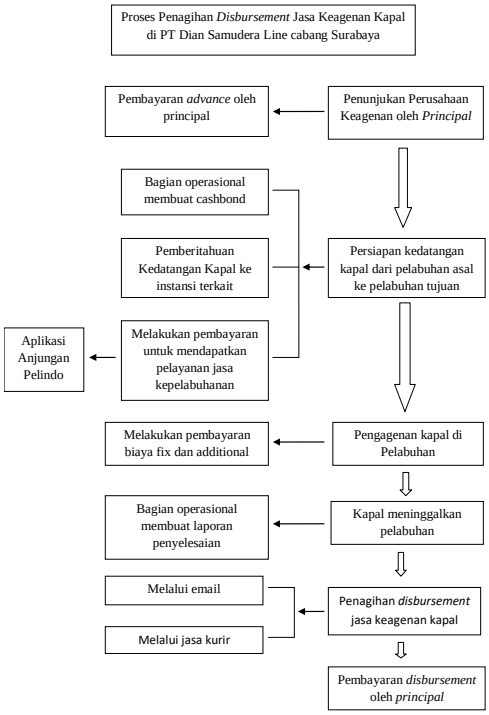

Proses penagihan *disbursement* di PT Dian Samudera Line cabang Surabaya sebenarnya melalui beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut diantaranya, yaitu (a) Melakukan pengumpulan data. (b) Melakukan pengumpulan bukti-bukti pengeluaran kegiatan operasional dan pengeluaran kapal lainnya. (c) Membuat rincian biaya atau *invoice* mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kapal. (d) Melakukan penagihan *disbursement* kepada *principal* disertai bukti-bukti pembayaran dan *invoice*. Bukti pembayaran dan *invoice* dikirimkan melalui *email* perusahaan yang selanjutnya dikirim melalui jasa kurir. (e) PT Dian Samudera Line cabang Surabaya memberikan tenggang waktu terhadap *principal* melakukan pembayaran *disbursement* paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan penagihan oleh bagian *finance and accounting.*

Penagihan *disbursement* di PT Dian Samudera Line cabang Surabaya dilakukan dengan mengirimkan *invoice* melalui email perusahaan. Jangka waktu yang diberikan perusahaan untuk melunasi *disbursement* yaitu 1 (satu) bulan setelah tanggal penagihan. Teknik pengumpulan piutang berdasarkan atas kebijakan penagihan piutang, yaitu: melalui surat, melalui telepon, kunjungan personal dan tindakan yuridis. Perusahaan dalam melakukan penagihan *disbursement* melalui telepon dan email perusahaan yang ditagihkan terhadap *principal* dengan mengirimkan bukti transsaksi. Bukti transaksi sendiri adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis. Bahwa bukti-bukti pembayaran sangat penting untuk dikirimkan ke *principal* untuk dijadikan dasar dari *invoice*. Bukti-bukti pembayaran yang dimaksud, yaitu: kwitansi, bukti setoran bank dan *invoice*.

Sistem yang digunakan perusahaan dalam melakukan penagihan *disbursement* yaitu melalui *email* resmi perusahaan melalui bagian *finance and accounting*. Perusahaan memilih melakukan penagihan melalui email karena email merupakan pintu utama perusahaan dengan konsumen untuk berkomunikasi. Selain melalui email perusahaan juga melakukan penagihan *disbursement* melalui telepon kepada *principal*.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu mengenai penagihan pengumpulan piutang oleh pelanggan adalah dengan cara mengirimkan surat peringatan satu minggu sebelum jatuh tempo yang ditentukan perusahaan. Jika melebihi jatuh tempo, Kabag keuangan menagih piutang dengan cara melalui telepon. Teknik penagihan piutang digunakan untuk memberi peringatan kepada pelanggan segara melunasi pembayaran dari perusahaan. (Surono, Rahayu dan Zahroh, 2015)

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai prosedur penagihan piutang dengan melakukan pengumpulan data serta bukti-bukti pembayaran terhadap customer. (Dolli Paulina Surupati, 2013)

Hal ini sejalan pula dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai penagihan piutang dengan melakukan pengumpulan data, bukti-bukti pengeluaran kegiatan operasional

kapal dan pengeluaran kapal serta denda yang diberikan karena keterlambatan pembayaran dari principal. (Permatasari, 2018)

Penagihan *disbursement* jasa keagenan kapal pada PT Dian Samudera Line cabang Surabaya sudah berjalan sesuai dengan prosedur. Namun masih ada beberapa kendala yang menyebabkan ketidaklancaran proses penagihan *disbursement*. Kendala-kendala yang terjadi diantaranya, yaitu:

Bagian operasional terkadang teledor dalam menyimpan bukti-bukti pembayaran pengeluaran kapal dikarenakan mengageni lebih dari satu kapal secara bersamaan. Hal ini menyebabkan penyusunan tagihan menjadi terhambat. Tanpa adanya bukti-bukti pembayaran tersebut *principal* tidak akan mau membayar biaya yang dikeluarkan agen. Maka dari itu bukti-bukti pembayaran sangatlah penting dalam penagihan *disbursement*.

Kurangnya Sumber Daya Mausia (SDM) dalam mengageni kapal maupun penagihan *disbursement*. Bagian yang melakukan penagihan *disbursement* yaitu bagian *finance and accounting* yang mana selama ini dalam melakukan penagihan dilakukan satu karyawan. Tanggung jawab pencatatan piutang usaha dan penagihan *disbursement* menjadi tanggung jawab satu karyawan saja. Sedangkan dalam mengageni kapal seringkali satu karyawan mengageni lebih dari satu kapal secara bersamaan. Hal ini menyebabkan kurang efisennya kegiatan operasional pelabuhan.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang membahas mengenai terdapat perangkapan jabatan antara bagian yang menyebabkan kegiatan operasional perusahaan dan penagihan piutang menjadi terhambat. (Dewi, 2009, Hayati, 2012)

Hal ini sejalan penelitian terdahulu yang membahas mengenai perjanjian awal antara perusahaan dan principal tidak diberikan diskon terhadap pembayaran *disbursement* yang lebih awal. Persyaratan kredit yang diberikan kepada pelanggan yaitu 0/0, n/30, tidak memberikan keuntungan bagi para pelanggan sehingga calon pelanggan cenderung memanfaatkan waktu pembayaran tepat pada waktu jatuh tempo atau lebih yang telah ditentukan perusahaan. Disamping itu, penagihan piutang kepada pelanggan hanya dilakukan melalui telepon dan melalui surat berupa peringatan untuk segera melunasi pembayaran. Sering kali *principal* terlambat membayar *disbursement* terhadap perusahaan keagenan kapal. Hal itu dikarenakan masih menunggu pengiriman dana dari pihak *shipper*. (Surono, Rahayu dan Zahroh, 2015, Permatasari, 2018)

Adanya kendala-kendala tersebut akhirnya menyebabkan *principal* telat melakukan pelunasan *disbursement*. Contoh telat bayar yang dimaksud yaitu kapal SPOB Lucinda dari PT Mitsi Citra Mandiri sebagai *principal*. Setelah PT Dian Samudera Line cabang Surabaya melakukan penagihan *disbursement*, *principal* harus melakukan pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penagihan. Akan tetapi PT Mitsi Citra Mandiri selaku *principal* dari kapal SPOB Lucinda tidak melakukan pembayaran *disbursement* sesuai perjanjian. Bahkan PT Mitsi Citra Mandiri melakukan pembayaran *disbursement* 4 (empat) bulan setelah tanggal penagihan *disbursement*.

Pada mulanya SPOB Lucinda tiba di Pelabuhan Gresik tanggal 24 Oktober 2018 dan meninggalkan pelabuhan tanggal 27 Oktober 2018. SPOB Lucinda melakukan kegiatan bongkar CPO di Pelabuhan Wilmar Gresik dan melakukan kegiatan tambahan *supply* air tawar dan kuras tangki. Pada tanggal 27 Oktober 2018 SPOB Lucinda meninggalkan Pelabuhan Wilmar Gresik. Pada tanggal 31 Oktober 2018 bagian *finance and accounting* melakukan penagihan *disbursement* terhadap PT Mitsi Citra Mandiri selaku *principal* dari kapal SPOB Lucinda. Namun pada tanggal 18 Februari 2019 *principal* baru melunasi *disbursement* jasa keagenan kapal SPOB Lucinda.

Berikut merupakan contoh *principal* yang melakukan telat bayar, yaitu:

Tabel 1 Keterlambatan Pelunasan *Disbursement*

No	Kapal	Tgl. Penagihan	Tgl. Pembayaran	Jumlah	Principal
1	SPOB Lucinda	31 Oktober 2018	18 Februari 2019	Rp. 25.657.286	PT Mitsi Citra Mandiri

Sumber: PT Dian Samudera Line cabang Surabaya

Keterlambatan pembayaran oleh *principal* menyebabkan kegiatan operasional perushaan menjadi terhambat.) Selain itu, factor lain adalah perusahaan tidak memberikan diskon atau potongan harga bagi *principal* yang melakukan pelunasan *disbursement* sebelum tanggal jatuh tempo. Begitu pula dengan *principal* yang

melakukan pelunasan *disbursement* tidak diberi sanksi oleh perusahaan. Hal ini dapat membuat *principal* menggampangkan pelunasan *disbursement*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan *disbursement* melalui beberapa tahap. Adapun tahapan proses pengelolaan *disbursement* yaitu, sebagai berikut:

Pemberian piutang usaha kepada *principal*, meliputi: a. Penawaran jasa keagenan kepada *principal* berupa EPDA. B. Jika harga telah disepakati maka selanjutnya *principal* melakukan pembayaran *advanca* atau uang muka minimal 50%. C. Jika harga ditolak maka tidak akan terjadi kesepakatan atara perusahaan dengan *principal*.

Proses penagihan *disbursement* jasa keagenan kapal, meliputi (a) Melakukan pengumpulan bukti-bukti pengeluaran kegiatan operasional dan pengeluaran kapal lainnya. (b) Membuat rincian biaya atau *invoice* mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kapal. (c) Melakukan penagihan *disbursement* kepada *principal* disertai bukti-bukti pembayaran dan *invoice*. (d) Bukti pembayaran dan *invoice* dikirimkan melalui *email* perusahaan yang selanjutnya dikirim melalui jasa kurir.

Pelaksanaan prakteknya, penagihan *disbursement* jasa keagenan kapal oleh PT. Dian Samudera Line cabang Surabaya sudah berjalan dengan lancar. Namun masih ada beberapa kendala-kendala yang menghambat kelancaran penagihan *disbursement*. Kendala-kendala yang dimaksud diantaranya, yaitu: Bagian Operasional kadang teledor menyimpan bukti-bukti pengeluaran kapal sehingga menyebabkan penagihan terhambat. Kurangnya karyawan di bagian operasional dan bagian *finance and accounting* yang menyebabkan karyawan melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu bersamaan. Tidak adanya diskon bagi *principal* yang melakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo maupun pemberian sanksi bagi *principal* yang melunasi melebihi tanggal jatuh tempo. Sehingga hal ini menyebabkan adanya keterlambatan pelunasan *disbursement* oleh *principal* yang menyebabkan terganggunya kegiatan operasional perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Harjito, Martono. 2008. *Manajemen Keuangan.* Edisi Satu. Yogyakartta: Ekonisia.

Suryono. RP, 2005. *Shipping: Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut*. Edisi Keempat. Cet 1. Jakarta: PPM.

Chan, Kah Sing. (2011:108) *Electronic Comemerce and Supply Chain Management*. Singapore

Devianti, 2012. *Tinjauan Atas Analisa Piutang Usaha pada Toyota Sales Operation (AUTO 2000) pada Cabang Cibiru Bandung*. Universitas Widyatama

Dewi, Irina. 2009. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internatas Penjualan Kredit dan Piutang Usaha Pada PT. Target Makmur Sentosa*. Universitas Bina Nusantara Jakarta.

Dwi Martani, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat

Earl K. Stice, James D. Stice dan K. Fred Skousen. 2014. *Akuntansi Intermadiate*. Penerbit: Salemba Empat.

H.A Abbas Salim. 1993. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasibuan. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hayati, Anggraeny Retno. 2012. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dan Sistem Pengendalian Piutang Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Terminal Petikemas Makassar*. Universitas Hasanudin Makassar

Keiso, Donald E., et al. 2010. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 33 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Mulyati, Sri. 2015 *Analisis Kondisi Piutang Usaha pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda*. Jurnal

Administrasi Bisnis. Vol. 3 No. 4 Hal: 769-781.

Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang diselenggarakan oleh unit Pelaksana Teknis (UPT) kantor Pelabuhan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan.

Permatasari Rizki, 2018. *Keterlambatan Biaya Pembayaran Pengurusan Kapal Pada Pt. Penascop Maritim IndonesiaCabang Samarinda (Studi Kasus: Pembayaran Denda Jasa Alih Muat Mv. Kanoura)*. Politeknik Negeri Samarindah

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. UU No. 7 Tahun 2004. TLN No. 4357

Rudianto. 2012. *Akuntansi Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Setiawan Iwan. 2010. *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermadiate accounting)*. Buku Satu. Bandung: Rafika Aditama.

Sugiri, Slamet. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar 2*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN.

Surupati Paulina. (2013). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Atas Penjualan Dan Penagihan Piutang Pada Pt. Laris Manis Utama Cabang Manado*. Jurnal EMBA. Vol. 1 No. 4 Hal. 422-432

Sutrisno. 2008. *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia

Warren, et al. 2015 *Accounting*. Edisi Dua Puluh Satu. Jakarta: Salemba Empat.

Zahroh, Z.A, Rahayu Mangesti, Surono Ardhi. (2015) *Pengelolaan Piutang Yang Efektif Sebagai Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Cv Walet Sumber Barokah Malang Periode 2012 – 2014)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 28 No. 1